**POLITIKA**: **Jurnal Ilmu Politik**

Vol.x, No. x, 202x

doi: 10.14710/politika.1x.x.202x.x-xxx

**Dinamika Politik Perilaku dan Partisipasi Memilih Masyarakat di Kabupaten Temanggung Dalam Kontestasi Pemilihan Umum**

**Dwanda Julisa Sistyawan**

Mahasiswa Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

**Abstrak:**

Dalam kontestasi pemilihan umum hal yang dibahas adalah evaluasi dinamika politik dan tingkat keterlibatan politik masyarakat di Kabupaten Temanggung, sebuah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam konteks pemilihan umum. Kabupaten ini memiliki rekam jejak partisipasi politik yang tinggi, dengan tingkat partisipasi pemilih yang stabil di atas 80% sejak pemilihan umum tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, mengandalkan sumber hukum sekunder untuk mengevaluasi peran serta masyarakat dalam proses pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyadari pentingnya pemilu sebagai sarana untuk menerapkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sesuai dengan Konstitusi 1945. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam memfasilitasi partisipasi politik, yang merupakan elemen kunci dalam membangun demokrasi lokal, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Studi ini memiliki potensi untuk memberikan informasi berharga bagi pengembangan demokrasi lokal yang lebih efektif dan transparan di Kabupaten Temanggung.

**Keywords:**

**Partisipasi Politik, Demokrasi, Perilaku Memilih, Pemilihan Umum**

**Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan yang mendsasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Konsepsi kedaulatan rakyat oleh para pendiri bangsa menjadi kesepakataan pada saat menjelang Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam naskah pembukaan alinea keempat memberikan pernyataan yang menyatakan ”kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat(Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, n.d.). Ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diimplementasikan pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar(UUD 1945, n.d.).

Dalam UUD 1945 dianut asas demokrasi karena syarat-syarat negara demokrasi telah diakomodir dalam UUD 1945. Hubungan asas demokrasi dengan pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga memberikan arti bahwa kekuasaan yang dibagi-bagikan berdasarkan fungsi, wewenang, dan kedudukan di dalam satu negara menunjukan bahwa paham demokrasi di anut dalam negara tersebut bukan negara yang bersifat monarki apalagi pemerintahan diktator(Mahfud, 2001).

Perwujudan kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi terlihat melalui pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) langsung, yang memungkinkan warga negara untuk memilih perwakilan mereka. Perwakilan ini bertugas mengawasi pemerintahan, mewakili aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang yang menjadi pijakan bagi semua sektor di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menyusun anggaran untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Kabupaten Temannggung yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yang berada di wilayah pegunungan Sumbing dan Sindoro, yang terdiri dari 20 (duapuluh) kecamatan. Kabupaten Temanggung memiliki sejarah partisipasi politik yang tinggi, dengan angka partisipasi pemilih yang selalu di atas 80% sejak pemilu 1999, yang merupakan prestasi mengingat rata-rata partisipasi di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah berada di bawah angka tersebut (Fitriyah et al., 2021).

Ciri negara demokratis tercermin dalam sejauh mana negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilihan umum. Keterlibatan politik masyarakat (pemilih) adalah unsur kunci dalam sistem demokrasi. Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi politik memengaruhi legitimasi yang diberikan oleh masyarakat kepada kandidat atau pasangan calon yang terpilih. Setiap individu memiliki preferensi dan kepentingan sendiri yang memengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum. Dapat dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam pemilihan umum sangat bergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Selain itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dapat dianggap sebagai mekanisme evaluasi dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan yang terpilih (Liando, 2016).

Dinamika politik dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Temanggung dalam kontestasi pemilihan umum merupakan topik yang penting dalam konteks pengembangan demokrasi lokal. Berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum untuk memperkuat kesadaran politik, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah(Dunggio & Yantu, 2021). Kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah(Hemafitria et al., 2021).

Pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Temanggung, memiliki peran krusial dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan, termasuk musrembang dan musyawarah perencanaan pembangunan(Arisandi, 2014). Dengan menerapkan kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dapat meningkatkan keterlibatan penduduk dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan lokal (Sari et al., 2021).

Di samping itu, dukungan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat juga bisa diperkuat dengan menerapkan teknologi informasi, seperti e-government. Hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi serta mempermudah keterlibatan mereka dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur (Budi Guntoro, Totok Wahyu Abadi, Nunung Prajarto, 2014)Selain itu, pendidikan pemilih juga memegang peranan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, dengan memberikan pengetahuan dan kesadaran politik yang diperlukan(Malik et al., 2022). Dengan demikian, melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan partisipasi masyarakat, Kabupaten Temanggung dapat mengoptimalkan proses pemilihan umum dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

**Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada pendekatan konseptual dan materi hukum skunder menjadi sumber data seperti bahan hukum dari buku, perundang-undangan, makalah ilmiah, hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Dinamika Politik dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Temanggung dalam Kontestasi Pemilihan Umum 2024. Pengumpulan data dengan mencari dan mengkaji bahan hukum yang menyangkut masalah penelitian yang selanjutnya data akan dianalisis agar memperoleh jawaban untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

**Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum**

Pemilihan umum adalah sebuah instrumen praktis dalam mewujudkan demokrasi. Tidaklah lengkap demokrasi tanpa adanya pemilihan umum. Meskipun demikian, pemilihan umum bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya merupakan alat untuk memilih perwakilan parlemen dan pemimpin eksekutif di tingkat pusat dan daerah. Sementara itu, tujuan utama kita sebagai bangsa dan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan pendidikan bagi seluruh warga, seperti yang dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 (Sahbana, 2017).

Partisipasi politik merujuk pada aktifnya seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan politik, yang meliputi pemilihan pemimpin negara yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada kebijakan pemerintah. Selain itu, partisipasi politik juga melibatkan tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri pertemuan umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, serta berinteraksi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Ini merupakan keterlibatan sukarela warga dalam proses pemilihan pemimpin dan dalam pembentukan kebijakan publik.(Akhrani et al., 2018).

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu karena. Penelitian oleh Sawerah et al. (Sawerah et al., 2016) menyoroti bahwa tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan pemilu karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap legitimasi pemerintahan. Selain itu, Arniti (Arniti, 2020) juga menekankan pentingnya mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum karena tingkat partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan suatu pemilu. Dalam konteks partisipasi masyarakat, penelitian oleh Amin et al. menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi dalam suatu kegiatan, seperti pencegahan kebakaran lahan, dapat disebabkan oleh rendahnya keanggotaan kelompok bagi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor internal dalam masyarakat dapat memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam konteks pemilihan umum. Selain itu, penelitian oleh Oktavia dan Saharuddin (Oktavia & Saharuddin, 2013) menyoroti pentingnya peran stakeholders dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai inisiatif pembangunan, termasuk dalam konteks pemilihan umum. Oleh karena itu, untuk mengkaji keterlibatan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal masyarakat, peran para pemangku kepentingan, dan signifikansi partisipasi politik sebagai tolok ukur keberhasilan pemilu.

**Partisipasi politik masyarakat sangat terkait dengan sistem demokrasi suatu negara. Dalam konteks negara yang demokratis, kekuasaan utama berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui partisipasi kolektif untuk menetapkan arah, visi masa depan, dan menentukan pemimpin** (Hemafitria et al., 2021). Secara umum, pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai proses politik. Ini dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan hak penuh masyarakat di daerah dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk turut serta dalam pengambilan keputusan dan menentukan pilihan kepemimpinan. Pemilihan umum diikuti oleh partai politik yang mewakili beragam kepentingan warga negara, seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, anti-korupsi, dan sebagainya, yang sering mereka angkat dalam kampanye politik mereka.

**Tabel 1.1**

**Apakah Bpk/Ibu/Sdr percaya bahwa kehadiran/partisipasi dalam pemilu penting untuk kita semua?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Frekuensi | Pesen | Valid  Pesen | Total Persen |
| Validasi | Percaya | 400 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Kurang Percaya | 117 | 19,5 | 19,5 | 86,2 |
| Tidak Tahu | 83 | 13,8 | 13,8 | 100,0 |
| Total | 600 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 600 responden yang dijadikan sampel pada Survey Perilaku Masyarakat Dalam Pembangunan Politik di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 terdapat Percaya (66,7%), Kurang Percaya (19,5%), dan Tidak Tahu (13,8%) (Temanggung, 2024).

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Temanggung, Indonesia, menjadi penanda penting dalam menilai berhasilnya jalannya proses demokrasi yaitu pemilu memiliki dampak positif terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih(Amin et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan faktor kunci dalam menilai keberhasilan suatu pemilu. (Arniti, 2020) Namun, ada kendala terkait kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik, pemahaman yang kurang tentang pentingnya pemilu, dan persepsi bahwa hasil pemilu tidak memengaruhi kehidupan mereka (Kusuma et al., 2022). Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga tercermin dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah, seperti melalui Musrenbang, yang mengamanatkan perencanaan Berdasarkan peranan dan wewenang pemangku kepentingan untuk mencapai kesatuan dan kerja sama yang harmonis antara mereka (Nur Wardhani, 2018). Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat mempengaruhi ekonomi lokal, dengan penelitian menunjukkan korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat dan dampak ekonomi lokal dalam pengembangan pariwisata daerah (Huda et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum juga terpengaruh oleh strategi komunikasi politik. Memperbesar partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dapat terwujud melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang visi, misi, dan program kerja calon kepala daerah (Kause, 2020). Tambahan lagi, keterlibatan politik masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat dievaluasi dari sudut pandang gender, contohnya, partisipasi politik pemilih wanita di berbagai wilayah di Indonesia. (Vifian Rasyadi & Fredian Tonny Nasdian, 2021). Oleh karena itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Temanggung harus diperkuat melalui pendidikan politik yang lebih efektif, pemahaman yang lebih matang tentang signifikansi pemilu, serta melalui strategi komunikasi politik yang efisien untuk melibatkan semua segmen masyarakat, termasuk pemilih wanita, dalam proses demokrasi.

**Tabel 1.2**

**Kecamatan Responden \* Apakah Bpk/Ibu/Sdr percaya bahwa kehadiran/partisipasi dalam pemilu penting untuk kita semua? Crosstabulation** (Temanggung, 2024)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kecamatan Responden | Apakah Bpk/Ibu/Sdr percaya bahwa kehadiran/partisipasi dalam pemilu penting untuk  kita semua? | | |
| Percaya | Kurang Percaya | Tidak Tahu |
| Bansari | 73,3% | 0,0% | 26,7% |
| Bejen | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Bulu | 70,0% | 3,3% | 26,7% |
| Candiroto | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Gemawang | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Jumo | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Kaloran | 30,0% | 46,7% | 23,3% |
| Kandangan | 60,0% | 30,0% | 10,0% |
| Kedu | 46,7% | 43,3% | 10,0% |
| Kledung | 50,0% | 23,3% | 26,7% |
| Kranggan | 63,3% | 20,0% | 16,7% |
| Ngadirejo | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Parakan | 60,0% | 36,7% | 3,3% |
| Pringsurat | 36,7% | 26,7% | 36,7% |
| Selopampang | 40,0% | 40,0% | 20,0% |
| Temanggung | 36,7% | 53,3% | 10,0% |
| Tembarak | 40,0% | 33,3% | 26,7% |
| Tlogomulyo | 30,0% | 33,3% | 36,7% |
| Tretep | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| Wonoboyo | 96,7% | 0,0% | 3,3% |

Partisipasi dalam pemilu merupakan aspek yang sangat penting bagi semua warga negara dalam sebuah negara demokratis. Partisipasi politik dalam pemilu tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan dari suatu pemilu (Nur Wardhani, 2018). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat memengaruhi legitimasi pemerintahan yang terpilih dan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan(Arniti, 2020). Keterlibatan kelompok disabilitas dalam pemilu juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepemimpinan yang berkualitas(Angelita & Arifin, 2023). Selain itu, partisipasi bukan hanya tentang kehadiran fisik di tempat pemungutan suara, tetapi juga mencakup elemen-elemen seperti kompetisi, integritas, dan legitimasi dalam pemilu(Hasanuddin, Marta, et al., 2021).   
Dalam kerangka demokrasi yang melibatkan pemilihan, keterlibatan politik dalam proses pemilu menjadi krusial sebagai indikator legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan yang terpilih melalui proses demokratis tersebut (Mahpudin, 2020).   
Faktor-faktor seperti pengenalan sosial, edukasi politik, dan ketersediaan akses memegang peran utama dalam meningkatkan keterlibatan pemilih, terutama di antara pemilih baru dan kelompok marginal seperti komunitas adat atau individu dengan disabilitas (Amrullah et al., 2021). Mengenalkan informasi tentang pemilihan umum bisa menjadi cara yang efisien untuk meningkatkan kualitas keterlibatan politik (Heriyanto et al., 2023). Pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu juga tidak bisa diabaikan. Kapasitas dan integritas penyelenggara pemilu sama pentingnya dengan kerangka hukum yang mengatur aturan main pemilu (Mahyudin et al., 2022). Penggunaan teknologi dalam pemilu juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan warga negara dan partisipasi dalam proses pemilu(Arifin, 2023). Dengan demikian, partisipasi dalam pemilu tidak hanya tentang kehadiran fisik di tempat pemungutan suara, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti sosialisasi, integritas, aksesibilitas, dan penggunaan teknologi. Semua ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik, mewakili kehendak rakyat, dan menghasilkan pemerintahan yang sah dan berkualitas. **Faktor Lain Yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Pemilih Di Kabupaten Temanggung**

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkah laku pemilih di Kabupaten Temanggung tidak hanya terbatas pada faktor-faktor konvensional seperti faktor sosiologis, psikologis, dan praktik politik uang. Penelitian yang telah dilaksanakan mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang juga berperan dalam hal ini memengaruhi perilaku pemilih. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku pemilih adalah faktor etnisitas. Penelitian oleh Khairunnas et al. (Jama et al., 2021) menyoroti perilaku pemilih dari kelompok etnis tertentu, seperti Chinese Ethnic Youth, yang dipengaruhi oleh faktor etnisitas dalam memilih kandidat. Selain itu, faktor ideologi juga dapat memainkan peran penting dalam perilaku politik pemilih, seperti yang dibahas dalam penelitian oleh(Jama et al., 2021), studi-studi menunjukkan bahwa preferensi ideologi dan karakteristik pribadi seperti keterbukaan terhadap pengalaman, kesungguhan, dan keramahan juga dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih. Selain itu, faktor lain seperti faktor agama juga dapat memengaruhi perilaku pemilih, seperti yang disorot dalam penelitian oleh(Fernardo, 2022), yang menemukan bahwa orientasi agama dapat menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan pemilih. Selain itu, faktor-faktor seperti literasi politik, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lingkungan juga dapat memengaruhi perilaku pemilih, seperti yang dibahas dalam berbagai penelitian terkait. Dengan demikian, untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi tingkah laku pemilih di Kabupaten Temanggung, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang telah diteliti dalam literatur, termasuk faktor etnisitas, ideologi, agama, literasi politik, kondisi ekonomi, dan faktor lingkungan. Integrasi dari berbagai faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap perihal pola perilaku pemilih di daerah tersebut.

**Tabel 2.1**

**Kecamatan Responden \* Apakah beraharap ada pemberian/bantuan Crosstabulation** (Temanggung, 2024)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kecamatan Responden | Apakah beraharap ada pemberian/bantuan | | |
| Ya, sangat berharap | Tidak mengahrapkan sama sekali | Tidak tahu |
| Bansari | 33,3% | 6,7% | 60,0% |
| Bejen | 63,3% | 36,7% | 0,0% |
| Bulu | 43,3% | 10,0% | 46,7% |
| Candiroto | 83,3% | 16,7% | 0,0% |
| Gemawang | 63,3% | 36,7% | 0,0% |
| Jumo | 80,0% | 20,0% | 0,0% |
| Kaloran | 56,7% | 20,0% | 23,3% |
| Kandangan | 43,3% | 6,7% | 50,0% |
| Kedu | 33,3% | 10,0% | 56,7% |
| Kledung | 36,7% | 3,3% | 60,0% |
| Kranggan | 53,3% | 10,0% | 36,7% |
| Ngadirejo | 90,0% | 10,0% | 0,0% |
| Parakan | 60,0% | 0,0% | 40,0% |
| Pringsurat | 53,3% | 13,3% | 33,3% |
| Selopampang | 53,3% | 10,0% | 36,7% |
| Temanggung | 70,0% | 10,0% | 20,0% |
| Tembarak | 66,7% | 16,7% | 16,7% |
| Tlogomulyo | 60,0% | 20,0% | 20,0% |
| Tretep | 53,3% | 23,3% | 23,3% |
| Wonoboyo | 26,7% | 23,3% | 50,0% |

**Tabel 2.2**

**Tingkat Pendidikan \* Apakah beraharap ada pemberian/bantuan Crosstabulation**(Temanggung, 2024)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tingkat Pendidikan | Apakah beraharap ada pemberian/bantuan | | |
| Ya, sangat berharap | Tidak mengahrapkan sama sekali | Tidak tahu |
| Tamat SD/Madrasah | 65,8% | 10,5% | 23,7% |
| SLTP/Sederajt | 55,6% | 7,4% | 37,0% |
| SLTA | 62,3% | 8,0% | 29,7% |
| PT | 12,9% | 8,6% | 18,6% |

Perilaku pemilih dalam memilih calon yang diharapkan memberikan bantuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Studi oleh Jama et al. (Jama et al., 2021) menyoroti alasan dan faktor yang memengaruhi pemilih, termasuk faktor sosial dan proses sosialisasi. Selain itu, faktor etnis juga dapat memainkan peran, seperti yang dibahas oleh (Khairunnas et al., 2018), yang meneliti perilaku pemilih generasi milenial dan generasi z dari etnis Tionghoa dalam kontestasi pilkada walikota Palembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih juga dapat melibatkan aspek psikologis dan sosiologis, seperti yang disorot oleh (Fernardo, 2022). Studi oleh Nugroho et al. (Nugroho et al., 2022) menunjukkan hubungan antara preferensi ideologi dan perilaku politik pemilih, dengan penekanan pada faktor kepribadian seperti keterbukaan, kesungguhan, dan keramahan. Selain itu, politik uang juga dapat memengaruhi perilaku pemilih, meskipun tidak selalu efektif di semua daerah, seperti yang disebutkan oleh (Hawing & Hartaman, 2021). Hasibuan (Hasibuan, 2019) menyoroti dominasi faktor usia dalam mempengaruhi perilaku pemilih, di mana pemilih dalam rentang usia tertentu cenderung memilih berdasarkan kedekatan personal. Faktor internal seperti kesadaran sebagai warga negara dan faktor ikut-ikutan juga dapat memengaruhi perilaku pemilih, seperti yang dijelaskan oleh (Maimun, 2021). Jati (Jati, 2022) menekankan bahwa sikap dan persepsi pemilih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian dan orientasi politik. Selain itu, literasi politik juga dapat memengaruhi perilaku pemilih, seperti yang dibahas oleh Fajrin (Fajrin et al., 2022). Studi oleh Simanjuntak & Fernandes (Simanjuntak & Fernandes, 2022) menunjukkan bahwa latar belakang etnis dapat menjadi faktor dominan dalam perilaku memilih masyarakat etnis Tionghoa. Dalam konteks psikologi politik, Daud (M.Daud, 2015) menyoroti faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku pemilih, sementara penelitian oleh Juri & Sugianto (Juri & Sugianto, 2020) menunjukkan bahwa pemilih cenderung memilih berdasarkan figur dan partai pengusung. Dengan demikian, perilaku pemilih dalam memilih calon yang diharapkan memberikan bantuan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial, etnis, psikologis, dan politik yang kompleks dan saling terkait.

**Tabel 2.3**

**Jenis pemberian Caleg yang paling menentukan Pilihan Politik** (Temanggung, 2024)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Frekuensi | Persen | Valid  Persen | Total  Persen |
| Validasi | Pemberian Individual (berupa uang) | 226 | 37,7 | 38,6 | 38,6 |
|  | Pemberian Kolektif (bantuan sosial, bantuan pembangunan masjid/musholla,  bantuan modal, dll) | 329 | 54,8 | 56,1 | 94,7 |
|  | Lainnya | 31 | 5,2 | 5,3 | 100,0 |
|  | Total | 586 | 97,7 | 100,0 |  |
| Missing | Sistem | 14 | 2,3 |  |  |
| Total | | 600 | 100,0 |  |  |

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa dari 600 orang yang dijadikan sampel pada Survey Perilaku Masyarakat Dalam Pembangunan Politik di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 terdapat Pemberian Kolektif (bantuan sosial, bantuan pembangunan masjid/musholla, bantuan modal, dll) (56,1%), Pemberian Individual (berupa uang) (38,6%), dan Lainnya (5,3%)

**Tabel 2.4**

**Kecamatan Responden \* jenis pemberian Caleg yang paling menentukan Pilihan Politik Crosstabulation**(Temanggung, 2024)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kecamatan Responden | jenis pemberian Caleg yang paling menentukan Pilihan Politik | | |
| Pemberian Individual (berupa uang) | Pemberian Kolektif (bantuan sosial, bantuan pembangunan masjid/musholla, bantuan modal, dll) | Lainnya |
| Bansari | 50,0% | 36,7% | 13,3% |
| Bejen | 0,0% | 85,7% | 14,3% |
| Bulu | 50,0% | 46,7% | 3,3% |
| Candiroto | 0,0% | 92,6% | 7,4% |
| Gemawang | 0,0% | 82,6% | 17,4% |
| Jumo | 0,0% | 80,0% | 20,0% |
| Kaloran | 43,3% | 56,7% | 0,0% |
| Kandangan | 60,0% | 33,3% | 6,7% |
| Kedu | 56,7% | 36,7% | 6,7% |
| Kledung | 53,3% | 43,3% | 3,3% |
| Kranggan | 43,3% | 56,7% | 0,0% |
| Ngadirejo | 7,1% | 89,3% | 3,6% |
| Parakan | 66,7% | 33,3% | 0,0% |
| Pringsurat | 60,0% | 40,0% | 0,0% |
| Selopampang | 33,3% | 66,7% | 0,0% |
| Temanggung | 56,7% | 43,3% | 0,0% |
| Tembarak | 46,7% | 53,3% | 0,0% |
| Tlogomulyo | 46,7% | 53,3% | 0,0% |
| Tretep | 30,0% | 63,3% | 6,7% |
| Wonoboyo | 50,0% | 43,3% | 6,7% |

Pemberian Caleg memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Informasi yang diberikan oleh para Caleg dapat menjadi referensi utama bagi pemilih dalam memilih dan menentukan arah pilihan politik mereka(Hasanuddin, Rizaldi, et al., 2021). Selain itu, pengalaman informasi yang diperoleh melalui media sosial juga memainkan peran krusial dalam membentuk pemahaman politik pemilih, terutama menentukan pilihan kepada calon presiden dan wakil presiden(Prasetyawan, 2020).

Keterwakilan perempuan dalam politik juga menjadi fokus penting, terutama dalam konteks modal yang dimiliki oleh Caleg perempuan di tengah politik patriarkhi. Analisis terhadap kasus-kasus seperti pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Sleman memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam politik(Ramadhany & Rahmawati, 2020). Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga menjadi aspek krusial dalam pemilihan umum, di mana pembentukan pemahaman tentang keterlibatan politik menjadi unsur krusial dalam dinamika demokrasi. (Arniti, 2020).

Dalam konteks politik, kekuatan ekonomi juga menjadi faktor penentu yang signifikan dalam memenangkan pertarungan politik elektoral. Terutama di tengah arus oligarki, kekuatan ekonomi menjadi elemen kunci dalam menentukan kemenangan dalam kontestasi politik(Assidiq & Triguswinri, 2021). Selain itu, fragmentasi politik dan habitus juga memainkan peran dalam persaingan antara sesama Caleg, terutama dalam konteks persaingan etnis seperti yang terjadi dalam beberapa pemilu(Sinaga & Adam, 2021).

Dari perspektif hukum, peran politik hukum sangat signifikan dalam membentuk prinsip-prinsip hukum di suatu negara. Politik hukum menjadi pijakan utama dalam proses penetapan dan pengembangan nilai-nilai hukum secara nasional (Al Idrus, 2022). Selain itu, kontestasi politik pada masyarakat desa juga memberikan gambaran tentang dinamika politik yang terjadi di tingkat lokal, termasuk faktor-faktor seperti soliditas tim sukses Caleg dan biaya politik yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan(Amin et al., 2020).

Dengan demikian, pemberian Caleg tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada pemilih, tetapi juga mencerminkan dinamika politik yang melibatkan berbagai faktor seperti gender, ekonomi, dan hukum. Pilihan politik masyarakat dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terkait dan kompleks, yang memerlukan pemahaman mendalam untuk dapat menginterpretasikan dinamika politik secara menyeluruh.

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum memiliki peran krusial dalam menerapkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sesuai dengan Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 menunjukkan mayoritas responden menyatakan harapan akan adanya bantuan atau pemberian, dan sebagian besar dari mereka akan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Temanggung menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan proses demokrasi, di mana mayoritas responden percaya akan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, serta menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber data. Dengan demikian, tulisan ini memberikan gambaran tentang dinamika politik dan partisipasi masyarakat dalam konteks pemilihan umum di Kabupaten Temanggung, serta menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga proses demokrasi dan kedaulatan rakyat.

**Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada Bapak Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kasbangpol) Kabupaten Temanggung Djoko Prasetyono,S.Sos.MM yang telah bersedia memberikan data sehingga dapat melengkapi data di karya tulis ini.

**Pendanaan**

Penulis tidak menerima dukungan keuangan untuk penelitian, penulisan, atau publikasi dari pihak mana pun.

**Daftar Pustaka**

Akhrani, L. A., Imansari, F., & Faizah, F. (2018). Kepercayaan Politik dan Partispasi Politik Pemilih Pemula. *Mediapsi*, *4*(1), 1–6. https://doi.org/10.21776/ub.mps.2018.004.01.1

Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *3*(2), 114–127. https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898

Amin, K., Ikramatoun, S., & Halik. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Desa Rias pada Pemilu 2019. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, *2*(3), 166–176. https://doi.org/10.22373/jsai.v2i3.1629

Amin, K., Nazaruddin, M., & Akmal, M. (2020). KONTESTASI POLITIK PADA MASYARAKAT DESA (Studi Kasus pada Pemilu Legislatif 2019 di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, *5*(2), 149. https://doi.org/10.24198/jwp.v5i2.29784

Amrullah, A., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Profesionalisme Penyelenggara Adhoc dalam Keberatan Saksi di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan. *PERSPEKTIF*, *10*(2), 321–344. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4426

Angelita, & Arifin, M. R. (2023). Pemenuhan Partisipasi Pemilih dan Hak Kelompok Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, *2*(04), 281–290. https://doi.org/10.58812/jmws.v2i04.302

Arifin, M. R. (2023). Pemanfaatan DIGI-EDVOT Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat (Upaya Peningkatan Literasi Politik Pada Penyandang Disabilitas). *Jurnal Pengabdian West Science*, *2*(04), 231–241. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i04.290

Arisandi, R. (2014). *Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kulo*. 1–7.

Arniti, N. K. (2020). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *4*(2), 329. https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496

Assidiq, F., & Triguswinri, K. (2021). Kontestasi Politik Perempuan Dalam Diskursus Gender dan Ekonomi Politik. *Jurnal Syntax Fusion*, *1*(11), 697–706. https://doi.org/10.54543/fusion.v1i11.108

Budi Guntoro, Totok Wahyu Abadi, Nunung Prajarto, dan. (2014). PERFORMANCE E-GOVERNMENT UNTUK PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Kawistara*, *4*(3). https://doi.org/10.22146/kawistara.6379

Dunggio, S., & Yantu, I. N. (2021). STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DI TENGAH PANDEMI COVID 19. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *8*(2), 156–169. https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.202

Fajrin, O., Erlinda, S., & Riau, U. (2022). *Rumah Pintar Pemilu Kampar dan Peningkatan Literasi Politik Peserta Didik Tingkat SMA*. *5*(4), 476–483. https://doi.org/10.24036/jce.v5i4.852

Fernardo, E. (2022). Mediatisasi Politik dan Perilaku Pemilih: Penggunaan Google Trend Sebagai Metode Alternatif Memprediksi Kemenangan Kandidat. *JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI*, *6*(1), 14–26. https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.2454

Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *12*(1), 1. https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10

Hasanuddin, H., Marta, A., & Asrida, W. (2021). Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *20*(1), 59–67. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.169

Hasanuddin, H., Rizaldi, A., Marta, A., & Ishak, I. (2021). Kesenjangan Angka Partisipasi Pemilih. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *20*(2), 37–45. https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.219

Hasibuan, M. I. (2019). FAKTOR –FAKTOR MEMPENGARUHI PERILAKU MEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU (Studi Kasus Kecamatan Rantau Selatan). *ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN)*, *2*(2), 67–83. https://doi.org/10.36987/ecobi.v2i2.710

Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, *3*(1), 45–53. https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533

Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI DESA PERAPAKAN KABUPATEN SAMBAS. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, *2*(1), 37. https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310

Heriyanto, H., Hermina, U. N., Zain, D., Sunarsih, S., Novieyana, S., Nurmala, N., & Prestoroika, E. (2023). Pelatihan Pemilih Pemula dalam Rangka Memberikan Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pemilu Untuk Peningkatan Partisipasi Mahasiswa pada Gelaran Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Pontianak. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, *5*(2), 297. https://doi.org/10.32493/j.pdl.v5i2.28092

Huda, H. M. D., Winarto, A. E., & Lestariningsih, L. (2022). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, *7*(2), 434. https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012

Jama, S. R., Wiyono, S., & Hady, N. (2021). Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *6*(2), 290. https://doi.org/10.17977/um019v6i2p290-301

Jati, W. R. (2022). *Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer : Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu*. *5*(2), 70–84.

Juri, J., & Sugianto, R. (2020). ANANILIS PERILAKU PEMILIH DI KELURAHAN KEDABANG KECAMATAN SINTANG PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019. *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *5*(2), 133–147. https://doi.org/10.31932/jpk.v5i2.942

Kause, W. L. (2020). Pengambilan Keputusan Musrenbang kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *FLOBAMORA*, *2*(2), 12–19. https://doi.org/10.46888/flobamora.v2i2.23

Khairunnas, K., Agustino, L., & Sumadinata, W. S. (2018). Chinese Ethnic Youth’s Voting Behavior in the 2018 Palembang Mayoral Election. *Journal of Moral and Civic Education*, *2*(2), 77–91. https://doi.org/10.24036/8851412222018102

Kusuma, I. W. M. W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2022). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, *7*(1), 12–19. https://doi.org/10.22225/pi.7.1.2022.12-19

Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, *3*(2), 15.

M.Daud. (2015). *PREDIKTOR PERILAKU PEMILIH PADA PEMILUKADA: Perspektif Psikologi Politik*. *1*(September).

Mahfud. (2001). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. In *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta.

Mahpudin, M. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, *2*(2), 113–128. https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.9035

Mahyudin, M., Sa’ban, L. M. A., Priono, R., Ramadhan, R., & Anton, A. (2022). Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, *2*(3), 158–164. https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.362

Maimun, A. (2021). *PERILAKU MASYARAKAT PAA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ( Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya , Kabupaten Aceh Besar )*. *2*(1), 1–16.

Malik, A., Syaripuddin, S., & Harianto, H. (2022). Voter’s Education dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Duampanua. *SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 18. https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v2i1.2844

Nugroho, A. T., Tobing, D. H., & Supriyadi, S. (2022). Preferensi ideologi dan perilaku politik pemilih pada Pilpres 2019: Asosiasi antara openness to experience, conscientiousness, agreeableness, dan otoritarianisme sayap kanan. *Jurnal Psikologi Udayana*, *9*(1), 71. https://doi.org/10.24843/JPU.2022.v09.i01.p08

Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, *10*(1), 57. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407

Oktavia, S., & Saharuddin. (2013). The Relationship between Role of the Stakeholders and Community participation in Agropolitan Program in Karacak Village, Leuwiliang Subdistrict, Bogor District. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *1*(3), 231–246. https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/9407%0Ahttps://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/9407/7371

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Prasetyawan, Y. Y. (2020). Pengalaman Informasi Pemilih Pemula Menggunakan Media Sosial sebagai Sarana Pembelajaran Politik dalam Menentukan Pilihan Calon Presiden. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, *8*(1), 21. https://doi.org/10.24252/kah.v8i1a3

Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *10*(1), 39–62. https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237

Sahbana, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, *7*(51), 2.

Sari, A. E., Amri, F., & Yusnita, I. (2021). PENGARUH REWARD TERHADAP KNOWLEDGE SHARING PERANGKAT DESA BERDAMPAK PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, *3*(2), 104–118. https://doi.org/10.35326/jiam.v3i2.861

Sawerah, S., Muljono, P., & Tjitropranoto, P. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penyuluhan*, *12*(1). https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v12i1.11323

Simanjuntak, D. F., & Fernandes, R. (2022). Perilaku Pemilih Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pemilu Legislatif di Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, *5*(3), 343–352. https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.644

Sinaga, R. S., & Adam, A. (2021). Fragmentasi Politik dan Habitus: Kasus Persaingan Sesama Calon Legislatif Etnis Tionghoa di Tiga Pemilu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *12*(2), 310–332. https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.310-332

Temanggung, K. B. dan P. K. (2024). *Laporan akhir survey perilaku masyarakat dalam pembangunan politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023*.

UUD 1945, Pub. L. No. Pasal 1 Ayat (2).

Vifian Rasyadi, & Fredian Tonny Nasdian. (2021). HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN DAMPAK EKONOMI LOKAL DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA MANDEH. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, *5*(3), 360–372. https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i3.829

**Tentang Penulis**

**Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A.** Lahir di Temanggung, Jawa Tengah 30 Juli 1990. Menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Temanggung, belajar Ilmu Hukum dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Magister Hukum Kenegaraan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sehari-harinya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di DJS & Partners Law Firm Temanggung. Sejak tahun 2018 bertugas sebagai Dosen di INISNU Temanggung pada Fakultas Hukum, Syariah, dan Ekonomi dan aktif mengajar hingga saat ini. Penulis mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebagai Mediator di Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan pada tahun 2021 diangkat menjadi Mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri Temanggung. Dibidang pengabdian kepada masyarakat, Penulis sebagai Pendiri dan saat ini menjabat sebagai Pembina Lembaga Bantuan Hukum Sardja Hadi Sardjana (LBH SHS) dibawah naungan Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Sardja Hadi Sardjana (YPBH SHS) yang memberikan pelayanan hukum berupa penyuluhan dan konsultasi seputar permasalahan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.